

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan konsep *financing terrorism*, *VNSA financing strategy*, dan *output legitimacy* di bawah payung teori *political economy of conflict* menghasilkan sebuah bukti bahwa aktivitas pungutan “zakat” yang dilakukan oleh JNIM dan ISGS bukan hanya sekadar pengumpulan dana biasa. Pungutan ini tidak dapat disebut sebagai zakat sesungguhnya karena tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ajaran Islam. Praktik ini juga bukan muncul dari kepatuhan sukarela warga, tetapi dari paksaan atau tindakan koersif JNIM dan ISGS yang membuat masyarakat tunduk. Kelompok ini menggunakan agama melalui retorika “zakat” sebagai taktik memperoleh pendanaan untuk operasionalnya di wilayah Burkina Faso, Mali, dan Niger karena kata “zakat” lebih familier dan mudah diterima oleh warga lokal. Di sisi lain, pungutan ini juga tidak dapat dikatakan sebagai *ghanimah*, *kharaj*, maupun usyur karena dalam praktiknya, JNIM dan ISGS mencampurkan ketiga instrumen tersebut dalam satu mekanisme yang sama. Pada akhirnya, pencampuran inilah yang merusak makna dari masing-masing instrumen itu sendiri. Hal ini juga mempertegas bahwa yang terjadi sesungguhnya merupakan pungutan paksa yang dibingkai dengan retorika keagamaan.

Dalam kacamata *politic economy of conflict*, penelitian ini menyoroti bahwa sumber dari kerentanan yang terjadi di Sahel tidak semata-mata terjadi karena radikalisme, tetapi dipengaruhi oleh faktor kondisi struktural yang melanda

kawasan Sahel. Hal ini menciptakan celah bagi kelompok-kelompok seperti JNIM dan ISGS untuk menguasai wilayah tersebut dengan berbagai caranya. Salah satunya dengan menggunakan retorika “zakat” sebagai alat untuk memperluas kekuasaannya. Dari perspektif *financing terrorism*, aktivitas tersebut bergerak melalui tiga tahapan, yaitu *raising*, *movement*, dan *using*. Dalam pandangan *VNSA financing strategy*, penetapan pungutan “zakat” sebesar 10% diberbagai lokasi tambang merupakan taktik oportunistik yang konsisten, terstandarisasi, jelas, serta tegas dari JNIM dan ISGS. Ini menjadikan kelompok-kelompok tersebut sebagai aktor yang dapat beroperasi dan berkembang dalam kurun waktu lama. Lambat-laun, peristiwa berikut akan menciptakan kepatuhan dari publik. Jika dilihat dari *output legitimacy* yang meliputi tiga faktor, seperti *policy output*, *governances outcomes*, dan *problem solving impacts*, JNIM dan ISGS tidak selamanya melakukan kekerasan atau aksi teror lainnya kepada warga lokal Sahel, khususnya Burkina Faso, Mali, dan Niger. Sebaliknya, kelompok-kelompok ini juga memberikan timbal balik nyata yang dapat memberikan perubahan terhadap kerentanan yang terjadi di Sahel.

Interaksi antara kelompok-kelompok tersebut dengan masyarakat lokal, mencakup pembukaan kembali wilayah tambang yang sebelumnya ditutup secara sepihak oleh pemerintah, penyaluran “zakat” kembali ke kelompok yang kurang mampu, juga pemberian layanan hukum yang lebih adil dan transparan. Dari aksi yang diberikan oleh JNIM dan ISGS, masyarakat menjadi lebih percaya berada di bawah pemerintahan kedua kelompok tersebut dibandingkan dengan otoritas lokal. Namun, jika pemerintah Sahel tidak mengambil tindakan efektif untuk

memberantas kelompok-kelompok tersebut, keamanan wilayah Sahel akan terancam akibat ekspansi dari JNIM dan ISGS.

4.2 Saran

Pada penelitian ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Salah satu keterbatasan yang paling sering dialami adalah proses pengambilan data lapangan karena hampir tidak terdapat informasi yang bersumber dari JNIM dan ISGS secara langsung. Situasi ini sangat wajar mengingat tingginya risiko keamanan jika mengakses informasi dari dalam kedua kelompok tersebut. Alhasil, analisis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari data-data sekunder, seperti laporan dari lembaga internasional dan artikel jurnal akademik.

Adanya kekurangan dan keterbatasan tersebut, penulis merekomendasikan beberapa saran yang dapat menjadi perhatian untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data primer, seperti wawancara yang lebih mendalam. Hal ini dinilai akan jauh lebih akurat dan detail dibandingkan dengan penelitian yang hanya memanfaatkan data sekunder saja. Dalam penelitian-penelitian berikutnya, diharapkan tidak hanya berhenti di jenjang akademis saja. Namun, juga dapat mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan serius dalam mengatasi isu politik dan ekonomi di Sahel, khususnya Burkina Faso, Mali, dan Niger.